

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Masyarakat dalam melakukan pengawasan perilaku dan menyelaraskan tujuan antara rakyat dan pemerintah, mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah, salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang termasuk, di dalamnya pengelolaan aset (Komala et al., 2020)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2018) Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Pengertian Aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (2018) Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari beberapa penjelasan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan harta yang bersumber dari suatu instansi pemerintah atau perusahaan yang digunakan untuk keperluan

operasionalnya dan memiliki masa manfaat 12 (dua belas) bulan atau satu tahun.

2.1.2 Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap menurut Standar Akuntansi memiliki beberapa karakteristik utama yaitu:

- a. Berwujud memiliki wujud fisik, dapat dilihat dan disentuh, seperti tanah, bangunan, mesin, perlatan dan kendaraan.
- b. Dimiliki untuk digunakan bukan untuk dijual kembali, melainkan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Biaya perolehan diukur secara andal dan akurat
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijuak dalam operasi normal

2.1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup aset tetap menurut PSAP adalah seluruh unit pemerintahan harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tetap yang diperlukan

2.2 Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) No. 07

2.2.1 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dikelompokan menurut sudut substansi yaitu aset berwujud (*tangible asset*) dan Aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) (Chandra et al., 2020), sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 (PSAP 07) adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam penggerjaan

Konstruksi dalam penggerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan umum pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.2.2 Pengelompokan Aset Tetap

Aset tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah dan sebagainya. aset tetap menurut PSAP dikelompokkan menjadi 4 kelas aset tetap utama yaitu:

a. Tanah

Tanah biasanya digunakan oleh perusahaan sebagai tempat dibangunnya bangunan pabrik maupun bangunan kantor

b. Perbaikan Tanah

Perbaikan tanah adalah struktur bangunan yang ditambahkan di tanah milik perusahaan. Contoh struktur bangunan tambahan adalah seperti pagar, lahan parkir, ataupun jalan.

c. Bangunan

Bangunan adalah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan

d. Peralatan

Peralatan adalah aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti peralatan kantor, mesin, kendaraan, dll

2.2.3 Pengakuan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07, untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria-kriterianya yaitu:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan instansi tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan instansi tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur.

2.2.4 Pengukuran Aset Tetap

Menurut Komisi Standar Akuntansi Pemerintah, pengukuran aset tetap dilakukan pada saat pengakuan awal serta pada saat pengukuran selanjutnya. Untuk pengukuran selanjutnya, aset tetap dapat diukur baik dengan menggunakan model biaya perolehan atau model nilai kini yaitu:

1. Aset tetap ini dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan araswakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya.

Pengukuran dapat dikatakan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti dari pembelian aset tetap yang diidentifikasi biayanya.

2.2.5 Penilaian Awal Aset Tetap

Beberapa kriteria dalam penilaian awal aset tetap yaitu

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, jika aset tetap di peroleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut di peroleh. Untuk keperluan penyusunan

neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

2. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
3. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset tertentu yang memiliki masa manfaat serupa ataupun nilai wajar yang serupa.
4. Biaya perolehan aset tetap sendiri diperoleh dari harga belinya atau harga konstruksinya, termasuk bea import dan setipa biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam pembawaan aset tetap tersebut ke kondisi yang sudah siap digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.

2.2.6 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Merupakan pengeluaran yang ditunjukan untuk memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2.2.7 Penyusutan Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset tetap yang tercantum dalam neraca serta beban penyusutan dalam laporan operasional.

Menurut PSAK No. 07 (2010) penyusutan merupakan penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

Menurut Kieso & Weygandt, (2007) penyusutan adalah sebagai proses akuntansi untuk mengalokasi harga pokok (cost) aset berwujud pada beban dengan cara yang sistematik dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan aset tersebut.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan penyusutan merupakan proses alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya secara sistematis dan rasional. Penyusutan mencerminkan penurunan nilai aset akibat penggunaan,

waktu, atau faktor lain. Tujuan dari penyusutan aset tetap adalah untuk menunjukan nilai asli pada suatu aset tetap tersebut.

Untuk metode Perhitungan Penyusutan Aset tetap PSAP memperkenalkan tiga jenis metode penyusutan, sebagai berikut:

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) 12 metode ini sering digunakan dalam akuntansi. Selain itu, terdapat rumus yang dapat dipakai yaitu metode perhitungan dengan nilai residu dan tanpa nilai residu

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- b. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining balance method*) metode ini merupakan metode penyusutan dipercepat, dimana Sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaat aset tersebut

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \times 2$$

- c. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*) metode ini adalah salah satu cara menghitung aset tetap yang menghasilkan sejumlah beban yang sama pada tiap unit yang dimanfaatkan.

$$\text{Penyusutan} = (NP) - (NR) \times \frac{\text{Pemakaian}}{\text{Kapasitas Maksimal}}$$

Beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan diadakannya penyusutan
Menurut Suryaputri V & Kemala, (2007) faktor-faktor yang
mempengaruhi penilaian penyusutan bisa dikelompokkan menjadi dua,
yaitu:

1. Faktor-faktor fisik

Faktor-faktor fisik yang mengurangi fungsi aktiva tetap disebabkan
karena:

- a. Aus karena pemakaian (*wear and tear*) aset tetap dalam proses produksi tidak hanya sekali saja, tetapi berlangsung secara terus menerus secara berlanjut mengakibatkan kapasitas dan produktivitas yang memiliki aktiva tetap itu akan semakin berkurang nilainya.
- b. Aus karena umur (*deterioration and decay*) setiap aktiva tetap dapat aus seiring dengan berjalannya waktu. Sekalipun aktiva tetap ini tak pernah dipakai, namun dengan adanya faktor kimia yang diakibatkan terhadap aktiva tersebut akan menyebabkan kerusakan dan mungkin tidak efisien untuk dipergunakan lagi.
- c. Kerusakan-kerusakan, suatu aktiva dapat disebabkan oleh kurang hati-hati atau kurang tepat dalam cara penggunaanya juga dapat disebabkan oleh bencana yang tidak sepenuhnya dapat dipergunakan kembali.

1. Faktor-faktor Fungsional

Faktor-faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap antara lain:

- a. Suatu keadaan dimana aktiva tidak dapat lagi memenuhi fungsinya, dengan demikian, meskipun secara teknis aktiva itu masih dapat

digunakan, tetapi karena tidak memenuhi kebutuhan perusahaan terpaksa diganti.

- b. Suatu keadaan dimana aktiva tetap telah kehilangan manfaatnya, yang dihasilkan, atau karena perkembangan teknologi dengan munculnya aktiva sejenis yang lebih modern dan dapat dipakai dengan ekonomis.

2.2.8 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaanya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2.9 Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap seperti:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) harus diungkapkan dalam laporan keuangan, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan; pelepasan; akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; mutasi aset tetap lainnya. Pada nilai penyusutan; metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat

atau tarif penyusutan yang digunakan; nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2. Informasi penyusutan mencakup, nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2.3 Tinjauan Penyesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

PSAP menjadi bagian dari keseluruhan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dibuat untuk menciptakan transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP merupakan pernyataan resmi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang mengatur prinsip, dasar, struktur dan prosedur akuntansi yang harus ditetapkan oleh entitas pemerintahan dalam Menyusun laporan keuangan.

Adapun tujuan PSAP yaitu:

1. Mengatur penyajian laporan keuangan

Agar laporan keuangan pemerintah disajikan secara transparan, akuntabel, relevan, dan dapat dibandingkan antara periode maupun antar entitas, seperti posisi keuangan (neraca), kinerja keuangan (laporan laba rugi) dan arus kas.

2. Membantu pembuat keputusan

Laporan keuangan yang berkualitas, disusun sesuai PSAP memberi kepastian bahwa keputusan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

3. Meningkatkan akuntabilitas

Laporan keuangan yang disusun sesuai PSAP menjadi dasar bagi audit dan pemeriksaan, yang meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat penelitian - penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mencari data atau informasi yang terdapat pada penulisan ini. Data atau informasi dalam penulisan

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	
				Penelitian	
1	Chessy Lawrence Nandadefrika, Dewi Anggraini, Yuli Nurhayati (2024)	Analisis Perlakuan Akuntansi Tetap Berwujud Berdasarkan Psak 16 pada Umkm Kopi Bubuk.	Deskriptif Kualitatif Aset	Perlakuan aset tetap pada UMKM Bubuk Adinda G19 tidak sesuai dengan PSAK 16. UMKM ini tidak menghitung penyusutan sesuai standar akuntansi, tidak memisahkan aset tetap dalam laporan	akuntansi berwujud UMKM Kopi G19 dengan standar akuntansi, tidak memisahkan aset tetap dalam laporan

					keuangan, dan tidak menjelaskan metode penyusutan dengan jelas. Hal ini berpotensi mengurangi akurasi laporan keuangan dan menghambat keterbukaan informasi kepada pihak luar.
2	Kholida Atiyatul Maula, Nesti Hapsari, Achmad Nawaw, Arif Rakhman (2024)	Analisis Perlakuan Akuntansi Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No.07 Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang	Deskriptif kuantitatif Aset	Perlakuan aset tetap klasifikasi pengukuran, pengakuan, pengeluaran, penyusutan, penghentian pelepasan, penyungkapan tetap pada BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan prinsip PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.	akuntansi berupa aset, pengakuan, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan serta penyungkapan aset tetap pada BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan prinsip PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.
3	M. R. Komala, I. C. Kusuma, Didi (2024)	Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi	Deskriptif Kualitatif	Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan penerapan pernyataan standar akuntansi	Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan penerapan pernyataan standar akuntansi

	Pemerintah (Psap) No. 07	pemerintah PSAP No. 07 Pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dan efektif.		
4	Ari Syahputra, Alden David Mekar Sidauruk, Ayu Zurlaini Damanik (2024)	Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Koperasi	Deskriptif	Perlakuan akuntansi aset tetap pada KSP KOPDIT CU Hidup Baru secara keseluruhan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16, tetapi dalam hal penyusutan aset tetap khususnya aset yang nilai bukunya sudah habis namun masih dapat digunakan tidak dilakukan penilaian kembali baik nilai ekonomisnya maupun umur manfaatnya (secara tidak langsung metode depresiasinya) agar aset selalu mencerminkan manfaat ekonomis yang terkandung didalamnya.
5	Inge Tasya Lonita, Afrah	Analisis Perlakuan	Deskriptif Komparatif	Dalam perlakuan melakukan akuntansi

Junita, Iqlima Azhar (2022)	Akuntansi Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 16 Tentang Aset Tetap Pada Pt Perkebunan Nusantara I (Persero) Langsa	Aset tetap Perkebunan Nusantara I (PERSERO) Langsa tidak sesuai dengan PSAK No. 16. Ketidaksesuaian tersebut mengenai: pengelompokan tanaman belum menghasilkan (TBM) kedalam aset tetap mengakibatkan nilai aset tetap tidak wajar pada PT. Perkebunan Nusantara I (PERSERO) Langsa. Selain itu yang menyebabkan laporan keuangan kurang dapat diandalkan dan relevan. Keterbatasan penelitian ini ialah penulis hanya mengambil dua indikator perlakuan akuntansi aset tetap yaitu pengakuan dan penyusutan saja. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan saran	PT.
-----------------------------------	--	---	-----

kepada peneliti selanjutnya agar memperluas penelitian dengan menambah indikator perlakuan akuntansi aset tetap seperti pengukuran dan pengungkapan.

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2025.